

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”, ini ditulis oleh Muhammad Bayu Aji dibimbing oleh Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag

**Kata Kunci:**Pembangunan Desa, Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Fiqih Siyasah

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pembangunan desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, seperti pembangunan daerah yang meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang diatas kemampuan sendiri. Pembangunan desa juga dapat dikatakan sebagai garis besar Negara. yang jika dilihat secara garis besar bahwa sebenarnya pembangunan di pedesaan itu harus meningkatkan pada perbaikan mutu pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung ataupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan.

Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ? 2) Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ? 3) Bagaimana pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?

Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitiannya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan: a) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa . b) Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren melalui musyawarah dari tingkat paling bawah. c) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diterapkan dalam tahap perencanaan. d) Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun. e) Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. 2) Ditinjau dari Pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86 yakni dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. 3) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten

Tulungagung Ditinjau dari fiqih siyasah sepenuhnya belum sesuai kaidah-kaidah fiqih siyasah sehingga kurang dapat mewujudkan kemaslahatan,kesejahteraan dan kurang koordinasi dengan masyarakat.

## ABSTRACT

Thesis entitled "Implementation of Village Infrastructure Development in the Act Number Perspective. 6 of 2014 concerning Villages and Siyasah Fiqh (Case Study in Batangsaren Village, Kauman Subdistrict, Tulungagung District)", this was written by Muhammad Bayu Aji guided by Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag

Keywords: Village Development, Law Number. 6 of 2014, Siyasah Fiqh

The research in this thesis is motivated by village development as an important and inseparable part of national development, such as the development of regions that lay the framework for the Indonesian people to grow and develop above their own abilities. Village development can also be said as the broad outlines of the state that is being used, which if seen in broad outline that in fact rural development must improve rural quality improvement through increasing village community initiatives and self-help and make maximum use of direct or indirect funds. not directly intended for rural development.

The formulation of the problem is 1) How is the implementation of infrastructure development in Batangsaren Village, Kauman District, Tulungagung District? 2) How is the implementation of infrastructure development in the perspective of Law Number. 6 of 2014 concerning Villages in Batangsaren Village, Kauman District, Tulungagung Regency? 3) How is the implementation of the Siyasah Fiqh perspective in Batangsaren Village, Kauman District, Tulungagung District?

The research approach is qualitative research, with descriptive research types. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The analysis technique used is data reduction, data presentation, verification and conclusion.

The results of the study are 1) The implementation of development in Batangsaren Village, Kauman Subdistrict, Tulungagung Regency was carried out by: a) Consideration before carrying out village infrastructure development planning. b) Planning for infrastructure development in Batangsaren Village through deliberations from the lowest level. c) Implementation of Village Development Planning Deliberation is implemented in the planning stage. d) Development programs that are a priority in prioritized development planning to be built are the construction and access of roads (rebate, paving, paving) talud (road support), makadam and bridges. e) The implementation stage of Village infrastructure development by prioritizing the annual village activities proposed, in its implementation must refer to technical instructions. 2) Implementation of the development of the Act Number perspective. 6 of 2014 concerning Villages in Batangsaren Village, Kauman Subdistrict, Tulungagung Regency shows that infrastructure development is in accordance with Law Number. 6 of 2014 concerning Villages Article 78-Article 86, carried out through planning, implementation, monitoring and supervision. Besides paying attention to many things including the condition of village land which is still often experiencing

movement, it can cause the road to be damaged. The implementation of road construction must pay attention to the weather because if during the rainy season, development will be constrained by standing water. 3) The implementation of siyasah fiqh perspective in Batangsaren Village, Kauman Subdistrict, Tulungagung Regency, has been implemented in accordance with existing laws, namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages. From the perspective of development, according to the jurisprudence of siyasah it has not been maximally implemented by the village, because the existing development has not been able to answer the needs desired by the community for the benefit of welfare. in, the implementation of development carried out by the village lacks coordination with the community members.